

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

TESIS

Oleh :

SYAEFUL BACHRI

NPM : 202120251041



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nama Mahasiswa : SYAEFUL BACHRI

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251041
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2023

Bekasi, April 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. JUANDA, S.H., M.H.
NIDN. 004056310


Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat
Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nama Mahasiswa : Syaeful Bachri

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251041

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2023

Bekasi, Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDN. 0324015802

Penguji I : Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
NIDN. 004056310

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN. 0325117405

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. LUSIA SULASTRI, S.H., M.H
NIDN. 0127117401

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. SLAMET PRIBADI, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Preasiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, April 2023

Yang membuat pernyataan



SYAEFUL BACHRI
NPM.202120251041

ABSTRAK

Syaeful Bachri. 202120251041 Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam menunjang pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan baik berupa barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen sebagai ujung tombak pelaksanaan pengadaan berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan maka dari itu perlu diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelau pengadaan. Perlindungan negara terhadap warga negara berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori kewenangan. Dalam penelitian ini di bahas mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Penulis mendapatkan dua kesimpulan perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat para pihak).

Kata kunci (*sentence case*): Pejabat Pembuat Komitmen, Perlindungan Hukum, Asas *Pacta Sunt Servanda*.

ABSTRACT

Syaeful Bachri. 202120251041, Legal Protection for Officers Making Commitments in Procurement of Government Goods/Services in View of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services.

In supporting infrastructure development, both government facilities and infrastructure, it is necessary to have procurement activities in the form of goods/services. Procurement of government goods/services is an activity to obtain goods/services by the Ministries/Institutions/Regional Work Units/Institutions whose process starts from planning needs until the completion of all activities to obtain goods/services. The Commitment Making Official as the spearhead of the implementation of procurement plays an important role in the implementation of procurement, therefore it is necessary to be given legal protection in carrying out his duties and authorities as a procurement agent. State protection of citizens applies wherever he is located in all corners of the world because the protection provided is one of the rights of citizens as stipulated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution. The research method used in this research is normative juridical research method through literature that examines primary, secondary and tertiary legal materials. The theory used in this study is the theory of legal certainty, theory of legal protection and theory of authority. This research discusses legal certainty and legal protection for Commitment Making Officials in the procurement of government goods/services. The author gets two conclusions that legal protection for Commitment Making Officials is not strictly regulated by applicable laws and regulations and the Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs, the Prosecutor's Office and the Police which is legally made has full legal ties in accordance with the Pacta Sunt Servanda principle (the promise is binding on the parties).

Keywords (sentence case): Commitment Making Officer, Legal protection, Principle of Pacta Sunt Servanda

.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penulis ucapkan atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis, karena berkat limpahan rahmat kemudahannya yang luar biasa sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini dengan lancar dan baik. Tesis ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”.

Penulis mengambil tema tesis ini berdasarkan pemikiran bahwa apa yang penulis teliti berdasarkan pada realita pekerjaan yang penulis lakukan. Tesis yang bertema tentang Hukum Tata Negara juga masih sangat sedikit yang melakukan penelitian. Semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang sedang membutuhkan ilmu tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari 5 Bab terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Analisa Perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Simpulan dan Saran. Adapun sistematika Tesis selengkapnya sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan;

Bab II tinjauan pustaka, membahas tinjauan hukum secara teoritis terdiri dari teori kepastian hukum, teori perlindungan hukun dan teori kewenangan sebagai landasan atau dasar penulis menemukan permasalahan dalam pengadaan

barang/jasa Pemerintah;

Bab III membahas perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana didalam peraturan tersebut belum diatur secara tegas;

Bab IV menganalisa perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dihubungkan dengan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan yang berisi simpulan yang dapat diambil dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan memuat saran-saran penulis.

Penulisan tesis ini berjalan baik berkat banyak bantuan yang diterima penulis dalam proses penyusunannya. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., M.H.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H.
5. Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Juanda, SH., MH. dosen dan pembimbing yang sangat luar biasa. Berkat ilmu dan kesabarannya membimbing, membuat penulis bersemangat untuk terus belajar, semoga kelak penulis dapat menjadi sehebat seperti beliau. *Aamiin yaarobbal alamiin.*

6. Pembimbing II, Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., yang sangat baik memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis.
7. Para Penguji sidang tesis, Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. Terima kasih atas masukan dan motivasi yang disampaikan, untuk menjadi perbaikan kedepannya.
8. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga penulis berhasil melangkah sampai tahap ini.
9. Teman-teman Prodi MIH kelas Bekasi Angkatan 2021, 30 orang luar biasa dari berbagai profesi yang keren-keren.
10. Teman seangkatan dari Pemerintah Kota Bekasi yang berhasil dirayu berjuang bersama menemani penulis menyelesaikan magister di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Teh Nung, Oca, Ria, Sila, Te Tika, Mbak Nesi, Pak Aji Samsuri, Pak Gomos, Pak Setiadi terima kasih semua.
11. Bapak/Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Rekan-rekan kerja pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi Khususnya Pokja A dan H Tahun 2021 terima kasih atas supportnya selama ini.
13. Bapak Drs. H. Momon Sulaeman, M.Si (Alm) dan Ibu Hj. Tati Nuryati, S.Hi (Almh) yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan perjuangan yang luar biasa semoga penulis bisa meneruskan nilai-nilai yang telah diajarkan selama ini, kelak kita akan berkumpul kembali di Surganya Allah SWT. Aamiin Yra..
14. Istriku sayang Riska Nurhasanah, anak-anakku tercinta Zeannisa Shareefa Bachri, Zaleeka Saqeenarava Bachri terima kasih atas pengorbananya selama penulis melaksanakan studi. You are my everything.

15. Adikku Nur'arafat, Nuriana dan Nurcahya Jelita terima kasih atas support dan doa nya, semoga kita selalu saling mendoakan dan membanggakan kedua orang tua.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak sekali kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, hal tersebut karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. karenanya Penulis berlapang dada menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun dalam perbaikan tulisan ini. Terakhir, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk pengembangan ilmu dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.



Bekasi, April 2023

SYAEFUL BACHRI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR COVER.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	12
1.2.1. Identifikasi Masalah	12
1.2.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	14
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	15
1.4.1. Kerangka Teori.....	15
1.4.2. Kerangka Konseptual	16
1.4.3. Kerangka Pemikiran	21
1.5. Metode Penelitian.....	22
1.5.1. Jenis Penelitian	22
1.5.2. Metode Pendekatan	23
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	23
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	25
1.6. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Teori Kepastian Hukum	29
2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	31
2.3. Teori Kewenangan	36
2.3.1. Unsur-Unsur Kewenangan.....	39
2.3.2. Jenis-Jenis Kewenangan.....	39
2.4. Pemerintah Daerah.....	41
2.4.1. Pengertian Pemerintah Daerah	41
2.4.2. Asas Pemerintah Daerah	44
2.4.3. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	45
2.4.4. Tugas Pemerintah Daerah	49
2.4.5. Tujuan Pemerintah Daerah.....	52
2.5. Aparatur Sipil Negara	52
2.5.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	52
2.5.2. Manajemen Aparatur Sipil Negara.....	53
2.5.3. Pengertian Pegawai Negara Sipil.....	54
2.6. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah.....	55
2.6.1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	55
2.6.2. Prinsip-Prinsip Pembentukan Pemerintahan yang Baik.....	56
2.6.3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	62
2.7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	68
2.7.1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	68
2.7.2. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	69
2.7.3. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	72
2.7.4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	72
2.7.5. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	74

BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	77
3.1 Perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	77
3.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	77
3.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	85
3.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	97
BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	104
4.1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pejabat Pembuat Komitmen.....	104
4.1.1. Penemuan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	104
4.1.2. Terobosan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	115
4.1.3. Pembaharuan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	118
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	122
5.1. Simpulan	122
5.2. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125